



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
LPSE BKPM TAHUN 2013**

**invest in
remarkable
indonesia**



KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 merupakan wujud upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan *good governance*. Demi mewujudkan *good governance*, upaya tersebut perlu untuk terus dilakukan secara berkesinambungan dengan cara mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang tepat, jelas dan terukur serta *legitimate*. Dengan demikian diharapkan jika hal tersebut berjalan dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LPSE didirikan sebagai perwujudan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sesuai dengan tujuan tersebut, penyusunan laporan akhir kegiatan LPSE sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Berdasarkan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat (sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara). Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada *level* di atasnya, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, serta kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja LPSE di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan.

Buku ini berisi informasi tentang akuntabilitas kinerja yang dicapai LPSE BKPM sepanjang tahun 2013. Selain berisi capaian kinerja, di dalam buku ini juga dijabarkan tentang rencana kegiatan LPSE BKPM pada tahun mendatang. Dengan disusunnya Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM TA 2013, diharapkan berbagai pihak, institusi maupun lembaga yang berkeinginan dan berkepentingan dengan layanan pengadaan barang/jasa BKPM akan memperoleh akses informasi, data serta pengetahuan yang memadai mengenai hal tersebut. Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi yang

berkepentingan dengan kinerja LPSE BKPM yang berlangsung sepanjang tahun anggaran 2013.

Jakarta, Februari 2014

a.n Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sekretaris Utama

Anhar Adel

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Bab I : Pendahuluan	4
Bab II : Laporan Kegiatan LPSE BKPM TA 2013	7
Bab III : Hambatan-Hambatan Kegiatan LPSE BKPM TA 2013 Dan Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014	15
Bab IV : Penutup	16
Lampiran-Lampiran	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penanaman modal, diminta mampu menunjukkan kinerja yang optimal atas program dan kegiatan yang telah disusun. LPSE sebagai unit kerja BKPM yang menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), kemudian diharapkan dapat melaksanakan fasilitas layanan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara tepat sasaran, bersih, transparan, dan akuntabel.

Koordinasi internal dan eksternal dilakukan di lingkungan BKPM maupun dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta dengan instansi teknis lainnya yang terkait dalam menyusun laporan akhir kegiatan LPSE sebagai pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban.

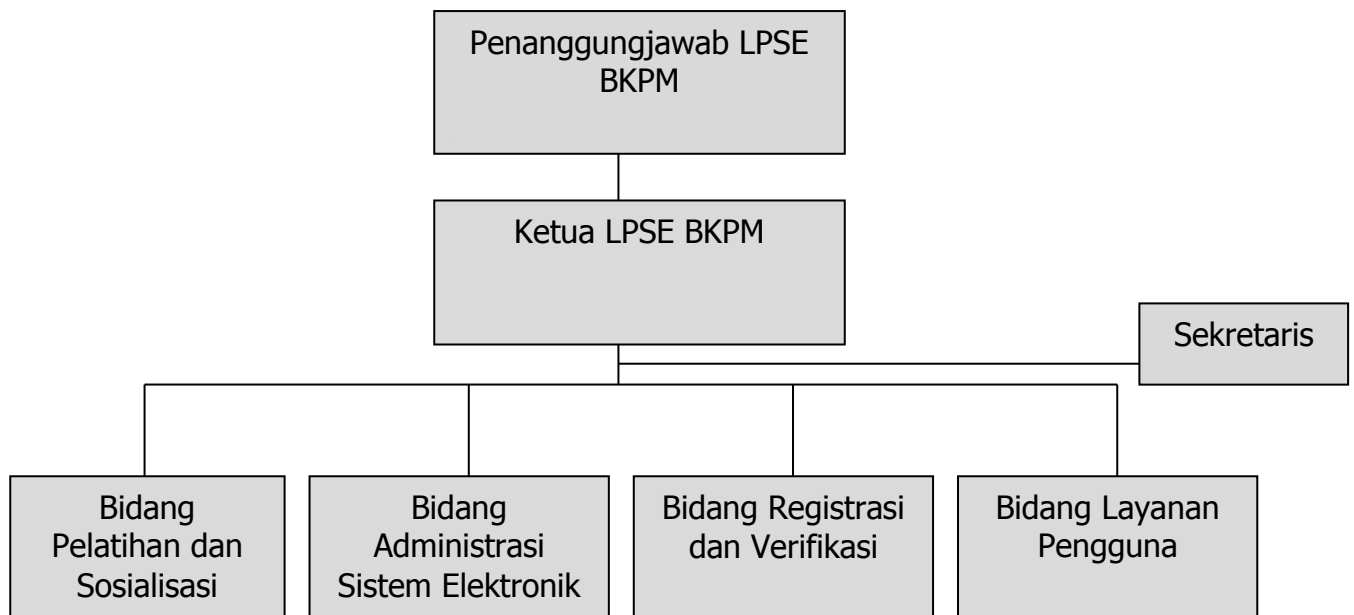
B. TUGAS DAN FUNGSI UNIT LPSE BKPM

LPSE BKPM sebagai salah satu unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPM, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di BKPM.
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya di lingkungan BKPM.
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia di LPSE BKPM.
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan bagi penyedia dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE di lingkungan BKPM.

C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT LPSE BKPM

Unit LPSE BKPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LPSE dan membawahi 4 (empat) bidang kerja LPSE seperti tergambar dalam bagan organisasi di bawah ini.



Pelaksanaan kegiatan antar Unit di lingkungan LPSE BKPM saling terkait baik dalam hal pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPM.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Akhir Kegiatan LPSE, BKPM Tahun 2013 ini terdiri dari 4 Bab. Bab I: PENDAHULUAN memuat: Latar Belakang; Tugas dan Fungsi Unit LPSE BKPM; Struktur Organisasi LPSE BKPM; dan Sistematika Penyajian Laporan.

Selanjutnya Bab II: LAPORAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013 memuat: Laporan Koordinator Bidang Administrasi Sistem Elektronik; Laporan Koordinator Registrasi dan Verifikasi; Laporan Koordinator Bidang Layanan Pengguna; Laporan Koordinator Bidang Pelatihan dan Sosialisasi dan; Laporan Kegiatan LPSE lainnya.

Dilanjutkan dengan BAB III: Hambatan-hambatan dalam kegiatan LPSE BKPM TA 2013 dan Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014.

Dan diakhiri dengan BAB IV: PENUTUP.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013

Sesuai dengan keputusan Sekretaris Utama BKPM No. 21 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKPM Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik BKPM, terdapat 4 bidang kerja LPSE dengan laporan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

A. BIDANG ADMINISTRASI SISTEM ELEKTRONIK

Secara keseluruhan, untuk periode Januari-Desember 2013 telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 104 dengan jumlah pagu senilai Rp. 182 miliar (data terlampir).

Unit Bidang Administrasi Sistem Informasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas :

1. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE);
2. Membuat satuan kerja/*agency* dan login user untuk panitia lelang yang terbagi dalam 5 satuan kerja/*agency* yaitu :
 - a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Sekretariat Utama;
 - b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan sampai dengan 5 Milyar pada Unit Selain Setama dan Promosi;

- d. Panitia pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, dan Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan yang bernilai diatas 5 milyar;
- e. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Seleksi Umum pada Unit Selain Setama dan Promosi.

Unit administrasi sistem informasi telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2013 sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2013 telah dilakukan *updating* Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), dari SPSE versi 3.0 menjadi versi 3.5. *Updating* SPSE ini dilakukan untuk menyesuaikan SPSE dengan Perpres 70 Tahun 2012;
2. Membuat *login user* untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Membuat *login user* untuk unit Inspektorat sebagai Auditor internal;
4. Membuat berita dan pengumuman di SPSE;
5. Sebagai *problem solver* jika panitia lelang mengalami permasalahan dalam penggunaan SPSE. Seperti perubahan jadwal lelang dan perubahan susunan kepanitiaan;
6. Sebagai mediator antara panitia lelang dengan LKPP jika terjadi permasalahan dalam SPSE yang tidak dapat diatasi oleh admin LPSE BKPM;
7. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKPP dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sistem keamanan SPSE;
8. Melakukan *maintenance server* dan aplikasi SPSE dan memastikan keberlangsungan ketersediaan aplikasi SPSE;
9. Melakukan *backup* data dan *maintenance server* LPSE BKPM.

B. BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI

Laporan hasil kerja tim Koordinator Bidang Registrasi dan Verifikasi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Registrasi dan Verifikasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Registrasi dan Verifikasi penyedia jasa, yaitu :
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh penyedia ketika melakukan registrasi pada LPSE BKPM;

- b. Memeriksa keaslian dokumen yang diserahkan oleh penyedia ketika melakukan registrasi pada LPSE BKPM;
 - c. Melakukan verifikasi pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) BKPM;
 - d. *Updating* NPWP penyedia jasa.
2. Jumlah penyedia yang melakukan registrasi pada LPSE BKPM selama tahun 2013 adalah sebanyak 252 penyedia dengan data terlampir.

C. BIDANG LAYANAN PENGGUNA

Laporan hasil kerja tim Koordinator Bidang Registrasi dan Verifikasi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Layanan Dukungan Pengguna bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:
 - a. Menjamin terlayannya penyedia jasa dan PPBJ dalam menggunakan fasilitas LPSE;
 - b. Menjamin terselesaikannya permasalahan penyedia jasa dan PPBJ dalam proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui SPSE;
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui SPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
2. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Layanan Dukungan Pengguna selama tahun anggaran 2013 adalah:
 - a. Membuat jadwal pelaksanaan piket harian LPSE BKPM dengan waktu pelaksanaan layanan hari Senin – Jumat pukul 10.00 – 15.00 (jadwal terlampir);
 - b. Menjawab pertanyaan/konsultasi yang dilakukan pengguna melalui website LPSE, email, telepon, maupun datang langsung ke LPSE BKPM (terlampir);
 - c. Melakukan pendampingan unggah dokumen di *Bidding Room* bagi penyedia;

- d. Melakukan pendampingan pelaksanaan aktivasi agregasi penyedia;
 - e. Melakukan koordinasi dengan *Helpdesk* LKPP terkait permasalahan yang terjadi di LPSE BKPM.
3. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Bidang Layanan Dukungan Pengguna juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKPP antara lain:
- a. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Pelatihan Standardisasi LPSE;
 - c. Pelatihan aplikasi SiRUP.

D. BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI

Unit LPSE Bidang Pelatihan dan Sosialisasi BKPM tahun 2013 dengan tugas utama melaksanakan pelayanan pelatihan (*training*) dan sosialisasi pengoperasian aplikasi SPSE kepada Penyedia, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), PPK BKPM serta Auditor BKPM telah melaksanakan dua kali pelatihan dan sosialisasi kepada penyedia dan panitia pengadaan barang/jasa BKPM pada tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Januari 2013 telah dilaksanakan training kepada penyedia bertempat di Ruang Rapat Medan (daftar terlampir). Untuk mendapatkan pelatihan/*training* SPSE bagi Penyedia, terlebih dahulu penyedia melakukan pendaftaran ke LPSE BKPM dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan ataupun mengunduh (*download*) pada portal LPSE BKPM (<http://lpse.bkpm.go.id>) atau melalui petugas LPSE di Ruang LPSE. Kemudian penyedia dapat menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas LPSE atau dikirimkan melalui email ke : lpse@bkpm.go.id. Penyedia akan menerima informasi jadwal training melalui email.

Aplikasi yang digunakan untuk training adalah SPSE versi *training* yang telah disediakan oleh LKPP dengan alamat <http://lpse.bkpm.go.id/latihan>. Materi *training* berisi pengenalan SPSE, cara penggunaan SPSE serta substansi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

2. Pada tanggal 8 April 2013 telah dilaksanakan pelatihan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) kepada PPBJ BKPM bertempat di Ruang Bandar Lampung, lantai 3, Gedung Suhartoyo BKPM. Acara Pelatihan SPSE dibuka oleh Ketua LPSE dan menghadirkan narasumber dari LKPP. Materi yang diajarkan, yaitu cara penggunaan aplikasi SPSE v.3.5 bagi PPBJ dengan memberi contoh pada proses lelang dengan metode prakualifikasi. Peserta pelatihan dapat mencoba langsung aplikasi SPSE v.3.5 bagi PPBJ dengan menggunakan username dan password panitia yang telah disediakan pada website training, pada link : <http://lpse.bkpm.go.id/latihan>.

Melalui aplikasi dalam SPSE versi 3.5, aktivitas yang dilakukan oleh PPBJ, antara lain :

- a. Membuat paket
- b. Menyusun spesifikasi lelang dan mengumumkannya
- c. Melakukan penjelasan lelang
- d. Mengunggah Dokumen Adendum Lelang (jika ada)
- e. Mengunduh dan melakukan pembukaan dokumen penawaran
- f. Melakukan evaluasi lelang
- g. Mengunggah berita acara evaluasi penawaran dan hasil pelelangan
- h. Menetapkan pemenang lelang
- i. Mengumumkan pemenang lelang
- j. Menjawab sanggahan

E. LAPORAN KEGIATAN LPSE LAINNYA

1. Pelatihan Terkait LPSE

Panitia LPSE BKPM telah mengikuti beberapa pelatihan terkait LPSE, diantaranya :

No	Nama Training	Tanggal	Lokasi	Peserta
1	Koordinasi Teknis dan Management Training LPSE Pre-Advance	6-8 Mei 2013	Palembang, Sumatera Selatan	Hyananda Prasasty Heningdan Asri Utami Fajari
2	Koordinasi Teknis dan Management Training LPSE Pre-Advance	13-15 Mei 2013	Manado, Sulawesi Utara	Astrid Indah Lestari dan Arsianti Wahyu Sumarini
3	Rakor Teknis Management Training dan Workshops Standarisasi LPSE	2-3 Juli 2013	Pekanbaru, Riau	Zuli Taufik dan Andri Ismoyo
4	Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SiRUP	7 November 2013	Jakarta	Astrid Indah Lestari, Dewi Rakhmiati , Wing Parikesit, dan Andri Ismoyo
5	Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Training Assessor	18-19 November 2013	Jakarta	Astrid Indah Lestari, Dewi Rakhmiati, Muhammad Suprihatin, Rinita Hariyani, Frielianna Yessie Lorenz Permata Sari

Di tahun 2013, 2 orang dari 5 orang anggota LPSE BKPM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis standarisasi LPSE dan *training assessor* 2013 pada

tanggal 18-19 November 2013 telah lulus ujian menjadi *assessor*, yaitu Dewi Rakhmiati dan Frielianna Yessie Lorenz Permata Sari.

2. Uji Forensik

Di dalam buku SOP (*Standard Operating Procedure*) Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang diterbitkan oleh LKPP pada tahun 2012, disana telah diatur bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kesalahan atau kegagalan bagi Panitia pengadaan dalam membuka atau mendeskripsi dokumen penawaran yang dikirim oleh Penyedia. Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Panitia pengadaan untuk melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran tersebut.

Tujuan dilakukannya uji forensik antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait pembukaan file penawaran (.rhs) oleh Panitia;
- b. Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal dideskripsi oleh Panitia;
- c. Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Selama Tahun Anggaran TA 2013, LPSE BKPM telah mengadakan tiga kali uji forensik untuk paket lelang sebagai berikut:

No	Nama Dokumen Uji Forensik	Nomor dan Tanggal Nota Dinas	PPBJ	Ketua
1	Uji Forensik Seleksi Umum Pekerjaan Modul Penyusunan Kompetensi BKPM TA 2013	Nomor 01/BAUF/PPBJ-BKPM/SU-27/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013	Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas dan Penunjukkan Langsung untuk	Suyanto

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM Tahun 2013

			Paket Pengadaan yang Bernilai di atas Lima Milyar pada BKPM, serta Seleksi Umum pada Unit Sekretariat Utama, Deputi Bidang Promosi dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM TA 2013	
2	Uji Forensik Pengadaan Kertas Fotocopy TA 2013	Nomor 04/S-03/PPBJ-Setama/III/2013 tanggal 4 Maret 2013	Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana dan Penunjukkan Langsung Unit Sekretariat Utama BKPM TA 2013	Afrida Wirjandini
3	Uji Forensik Pengadaan Kontraktor Rehabilitasi Interior Gedung BKPM TA 2013	Nomor 05/S-13/PPBJ-Setama/IX/2013 tanggal 5 September 2013	Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Sederhana, dan Penunjukkan Langsung Unit Sekretariat Utama BKPM TA 2013	Afrida Wirjandini

BAB III

HAMBATAN-HAMBATAN KEGIATAN LPSE BKPM TA 2013 DAN RENCANA KEGIATAN LPSE BKPM TA 2014

A. Hambatan-Hambatan Dalam Kegiatan LPSE BKPM TA 2013

Dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan LPSE tahun 2013, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Terdapat permasalahan jadwal lelang pada metode prakualifikasi yaitu pada waktu pemasukan dokumen dan evaluasi dokumen yang dilakukan dalam satu waktu (sesuai Perpres 70 tahun 2012). Sedangkan ada beberapa penyedia yang memasukan dokumen di akhir waktu pemasukan dokumen, sehingga panitia merasa perlu melakukan perubahan jadwal waktu lelang untuk memberikan kesempatan kepada panitia melakukan evaluasi dokumen pelelangan;
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Training SPSE adalah keterbatasan Tim LPSE Bidang Pelatihan dan Sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 (dua) orang trainer. Masing-masing trainer juga terikat pada tugas-tugas utama dari unit kerja masing-masing. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan training SPSE harus menyesuaikan dengan jadwal trainer dan penyedia.

B. Rencana Kegiatan LPSE BKPM TA 2014

Meningkatkan kompetensi anggota LPSE BKPM dengan mengikuti kegiatan sebagai berikut :

1. Seminar dan workshop;
2. Sosialisasi dan pelatihan;
3. Kunjungan ke unit LPSE yang telah mendapatkan penghargaan e-procurement award dari LKPP seperti LPSE Provinsi Jawa Barat;
4. Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung LPSE BKPM;
5. Pembuatan standing banner LPSE BKPM.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM T.A. 2013, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi unit LPSE BKPM, yang disusun untuk menjabarkan pencapaian kinerja utama unit LPSE BKPM dalam rangka mencapai sasaran strategis, dan tujuannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian visi dan sebagian misi BKPM.

Secara keseluruhan, untuk periode Januari-Desember 2013 telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 104 dengan jumlah pagu senilai Rp. 182 miliar. Jumlah lelang yang telah selesai berjumlah 86 paket dengan nilai pagu Rp. 145 miliar. Nilai hasil lelang Rp. 119 miliar, sehingga terjadi penghematan sebesar 19,92 %.

Pada tahun 2013, Bidang Administrasi Sistem Elektronik telah melakukan updating sistem SPSE dari 3.0 ke 3.5, pembuatan login user untuk PPK dan Auditor di Inspektorat, membuat berita SPSE, mediator penyelesaian permasalahan SPSE, melakukan maintenance server dan aplikasi SPSE, mengikuti kegiatan terkait peningkatan infrastruktur dan sistem keamanan SPSE, serta melakukan backup data dan *maintenance server* LPSE BKPM.

Bidang Registrasi dan Verifikasi telah melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait registrasi dan verifikasi pada SPSE BKPM sebanyak 252 penyedia.

Bidang Layanan Pengguna telah menyusun jadwal piket anggota LPSE BKPM, menjawab pertanyaan yang dilakukan pengguna ke LPSE BKPM, mendampingi penyedia mengunggah dokumen di *Bidding Room*, pendampingan pelaksanaan aktivasi agregasi penyedia, melakukan koordinasi dengan Helpdesk LKPP terkait permasalahan yang terjadi di LPSE BKPM, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP.

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi telah melaksanakan dua kali pelatihan SPSE kepada penyedia dan panitia PPBJ, yaitu pada bulan Januari 2013 dan bulan April 2013.

Upaya-upaya peningkatan kinerja LPSE BKPM pada T.A. 2013 dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, kunjungan ke unit LPSE yang mendapat penghargaan dari LKPP dan peningkatan kegiatan pelatihan dan sarana prasarana.

Laporan Akhir Kegiatan LPSE BKPM T.A. 2013 kiranya dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh jajaran di tim LPSE BKPM TA 2013, dengan harapan seluruh jajaran tim dapat memahami kekurangan dan kelemahan, baik kelemahan orang-perorang maupun kelemahan unit LPSE secara keseluruhan, sehingga dengan demikian dapat secara bersama-sama melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A : Data Pengadaan Barang/Jasa BKPM Januari-Desember 2013

Lampiran B : Daftar Perusahaan yang Diverifikasi Tahun 2013

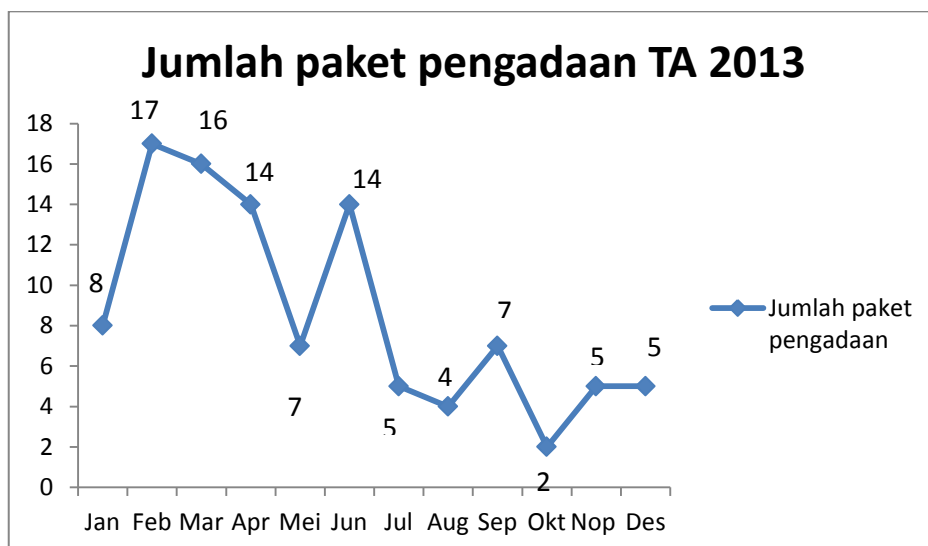
Lampiran C : Daftar Peserta yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2013

Lampiran D : Daftar Tanya Jawab Konsultasi Pengguna SPSE (Penyedia Jasa)

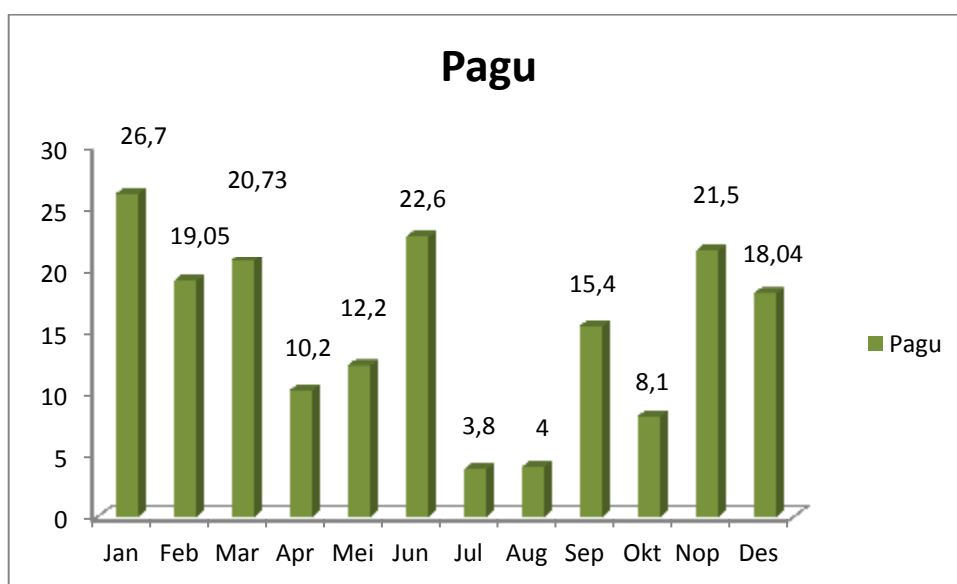
Lampiran E : Daftar Piket LPSE BKPM TA 2013

**Data Pengadaan Barang/Jasa BKPM Januari-
Desember 2013**

Jumlah Paket Pengadaan TA 2013 : 104 paket



Jumlah Pagu Pengadaan TA 2013: Rp. 182 Miliar



Lelang BKPM TA 2013

Jumlah Lelang Selesai	88
Nilai Pagu (dalam juta Rupiah)	150
Nilai Hasil Lelang (dalam juta Rupiah)	123
Selisih Pagu (dalam juta Rupiah)	27
Persentase penghematan	17,82 %

Lelang BKPM TA 2008-2013

Jumlah Pengadaan	166
Jumlah pagu Pengadaan (dalam juta Rupiah)	385,394
Jumlah Lelang Selesai	148
Nilai Pagu (dalam juta Rupiah)	349,015
Nilai Hasil Lelang (dalam juta Rupiah)	293,249
Selisih Pagu (dalam juta Rupiah)	55,766
Persentase penghematan	15,98 %

JUMLAH PAKET DAN NILAI LELANG TA 2013

Tanggal File Disimpan	Nama LPSE	Jumlah		Pagu (Juta Rp)	Nilai Hasil Lelang (Juta Rp)	Selisih (Juta Rp)	Persen
		Jumlah Lelang	Lelang Selesai				
30/01/2014 3:10	Kementerian Lingkungan Hidup	50	43	86	77	9	9,98%
	LPSE Badan Informasi Geospasial	162	157	272	252	20	7,28%
	LPSE Badan Intelijen Negara	21	18	46	35	11	24,52%
	LPSE Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	109	95	785	671	114	14,53%
	LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal	104	88	150	123	27	17,82%
	LPSE Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	264	238	500	477	23	4,63%
	LPSE Badan Narkotika Nasional	86	82	207	193	15	7,10%
	LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana	68	64	749	712	37	4,96%
	LPSE Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	19	19	169	164	6	3,39%
	LPSE Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	46	43	56	53	3	5,47%
	LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan	228	176	323	302	21	6,53%
	LPSE Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	157	145	544	524	20	3,68%
	LPSE Badan Pengusaha Batam	89	76	245	219	26	10,56%
	LPSE Badan Pertanahan Nasional	141	121	412	371	42	10,08%
	LPSE Badan Pusat Statistik	34	31	231	220	10	4,40%
	LPSE Badan SAR Nasional	185	164	917	887	30	3,32%
	LPSE Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	7	5	4	3	1	26,63%
	LPSE Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	50	49	169	146	23	13,74%
	LPSE Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	28	27	21	20	1	3,51%
	LPSE Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	13	19	19	18	0	2,19%
	LPSE Institut Teknologi Bandung	111	70	125	112	14	11,03%

LPSE Institut Teknologi Sepuluh Nopember	133	103	287	255	32	11,04%
LPSE Kabupaten Aceh Barat	91	85	63	58	4	6,51%
LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya	124	120	897	75	823	91,67%
LPSE Kabupaten Aceh Besar	201	198	163	151	12	7,53%
LPSE Kabupaten Aceh Jaya	283	275	222	214	8	3,56%
LPSE Kabupaten Aceh Selatan	107	92	67	63	4	5,94%
LPSE Kabupaten Aceh Singkil	221	195	122	113	9	7,30%
LPSE Kabupaten Aceh Tamiang	206	203	135	128	6	4,82%
LPSE Kabupaten Aceh Tengah	108	101	67	64	2	3,39%
LPSE Kabupaten Aceh Tenggara	252	239	193	190	3	1,45%
LPSE Kabupaten Aceh Timur	159	153	167	162	5	2,78%
LPSE Kabupaten Aceh Utara	352	341	377	363	14	3,83%
LPSE Kabupaten Anambas	442	381	350	324	26	7,56%
LPSE Kabupaten Asahan	3	3	11	11	0	1,27%
LPSE Kabupaten Badung	509	492	1092	963	129	11,80%
LPSE Kabupaten Balangan	171	159	197	188	9	4,46%
LPSE Kabupaten Bandung	369	359	294	265	30	10,06%
LPSE Kabupaten Banggai	97	90	133	124	9	6,58%
LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Bangka	203	191	167	161	7	3,89%
LPSE Kabupaten Bangka Barat	198	168	146	133	13	8,90%
LPSE Kabupaten Bangka Selatan	149	143	154	144	10	6,40%
LPSE Kabupaten Bangka Tengah	172	158	124	118	6	4,65%
LPSE Kabupaten Bangkalan	181	179	170	163	7	4,39%
LPSE Kabupaten Bangli	57	54	43	40	3	7,54%
LPSE Kabupaten Banjar	207	159	135	127	8	6,13%
LPSE Kabupaten Banjarnegara	211	170	143	137	6	4,37%
LPSE Kabupaten Bantaeng	73	71	130	128	1	1,01%
LPSE Kabupaten Bantul	188	185	149	144	5	3,13%
LPSE Kabupaten Banyuasin	481	460	428	415	12	2,92%
LPSE Kabupaten Banyumas	353	319	207	183	24	11,48%
LPSE Kabupaten Banyuwangi	292	276	286	252	34	11,82%
LPSE Kabupaten Barito Kuala	228	226	320	303	17	5,27%
LPSE Kabupaten Barito Selatan	160	150	120	116	4	3,37%
LPSE Kabupaten Barito Timur	18	10	23	23	1	2,27%
LPSE Kabupaten Barito Utara	204	192	105	99	6	5,80%

LPSE Kabupaten Barru	96	95	102	96	6	5,45%
LPSE Kabupaten Batang	211	198	147	136	11	7,36%
LPSE Kabupaten Batanghari	219	213	303	282	21	6,85%
LPSE Kabupaten Bekasi	1955	1878	1085	984	101	9,29%
LPSE Kabupaten Belitung	145	135	154	142	11	7,35%
LPSE Kabupaten Belitung Timur	148	142	141	130	11	7,71%
LPSE Kabupaten Belu	154	145	149	145	4	2,82%
LPSE Kabupaten Bener Meriah	99	93	51	47	4	7,02%
LPSE Kabupaten Bengkalis	86	80	2619	2380	238	9,10%
LPSE Kabupaten Bengkayang	15	15	20	20	0	1,77%
LPSE Kabupaten Bengkulu Selatan	101	84	74	68	6	8,03%
LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah	25	23	35	34	1	3,71%
LPSE Kabupaten Bengkulu Utara	60	53	101	98	3	3,37%
LPSE Kabupaten Berau	549	491	562	508	54	9,69%
LPSE Kabupaten Bima	79	76	100	93	7	6,74%
LPSE Kabupaten Bintan	269	259	241	228	13	5,24%
LPSE Kabupaten Bireuen	37	38	256	54	202	78,84%
LPSE Kabupaten Blitar	192	188	145	135	10	6,78%
LPSE Kabupaten Blora	150	146	178	169	8	4,70%
LPSE Kabupaten Boalemo	54	48	59	56	3	5,58%
LPSE Kabupaten Bogor	98	89	161	150	11	6,61%
LPSE Kabupaten Bojonegoro	411	406	347	322	25	7,32%
LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow	84	83	65	58	7	10,40%
LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Bombana	388	324	160	158	3	1,78%
LPSE Kabupaten Bondowoso	143	135	95	89	6	6,23%
LPSE Kabupaten Bone	96	95	114	109	5	4,27%
LPSE Kabupaten Bone Bolango	112	111	97	92	5	5,51%
LPSE Kabupaten Boyolali	44	42	78	75	3	3,67%
LPSE Kabupaten Brebes	175	143	110	100	10	9,50%
LPSE Kabupaten Buleleng	124	110	115	104	11	9,61%
LPSE Kabupaten Bulungan	282	242	910	862	48	5,31%
LPSE Kabupaten Bungo	160	150	234	226	9	3,68%
LPSE Kabupaten Buton	295	287	211	209	2	0,83%
LPSE Kabupaten Buton Utara	131	124	89	86	3	3,09%

LPSE Kabupaten Cianjur	286	271	249	234	15	6,18%
LPSE Kabupaten Cilacap	278	272	178	166	11	6,35%
LPSE Kabupaten Cirebon	393	381	263	246	17	6,46%
LPSE Kabupaten Dairi	204	201	107	105	2	1,87%
LPSE Kabupaten Deli Serdang	76	74	105	100	5	4,79%
LPSE Kabupaten Demak	364	358	273	270	2	0,76%
LPSE Kabupaten Dharmasraya	72	62	59	54	5	8,62%
LPSE Kabupaten Dompu	62	55	76	72	3	4,52%
LPSE Kabupaten Donggala	172	170	173	168	5	2,87%
LPSE Kabupaten Empat Lawang	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Ende	103	98	69	61	9	12,34%
LPSE Kabupaten Enrekang	91	91	88	82	6	6,57%
LPSE Kabupaten Flores Timur	89	80	57	52	4	7,80%
LPSE Kabupaten Gayo Lues	98	90	78	74	4	5,51%
LPSE Kabupaten Gianyar	122	115	143	131	12	8,27%
LPSE Kabupaten Gorontalo	110	105	89	81	8	8,70%
LPSE Kabupaten Gorontalo Utara	90	83	62	57	5	8,69%
LPSE Kabupaten Gresik	227	217	290	252	38	13,05%
LPSE Kabupaten Grobogan	245	236	164	152	12	7,30%
LPSE Kabupaten Gunung Kidul	75	73	40	33	7	17,91%
LPSE Kabupaten Gunung Mas	8	7	25	24	1	4,53%
LPSE Kabupaten Halmahera Selatan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Halmahera Utara	97	76	60	56	4	7,43%
LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan	155	146	128	121	8	6,10%
LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah	226	219	215	194	21	9,93%
LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara	93	89	82	75	8	9,13%
LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan	220	197	115	112	3	2,46%
LPSE Kabupaten Indragiri Hilir	237	225	199	160	39	19,69%
LPSE Kabupaten Indragiri Hulu	456	414	415	373	42	10,06%
LPSE Kabupaten Indramayu	445	445	377	354	23	6,04%
LPSE Kabupaten Jember	200	192	196	183	13	6,52%
LPSE Kabupaten Jembrana	150	147	131	118	13	10,05%
LPSE Kabupaten Jepara	189	183	146	136	10	6,77%
LPSE Kabupaten Jombang	197	194	229	104	125	54,53%
LPSE Kabupaten Kampar	558	546	843	767	75	8,93%
LPSE Kabupaten Kapuas	126	97	68	64	4	6,04%

LPSE Kabupaten Kapuas Hulu	238	238	294	289	5	1,54%
LPSE Kabupaten Karanganyar	145	142	150	142	7	4,85%
LPSE Kabupaten Karangasem	10	9	26	22	3	12,33%
LPSE Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Karo	313	308	219	217	2	0,95%
LPSE Kabupaten Katingan	205	182	210	200	11	5,09%
LPSE Kabupaten Kaur	75	72	75	70	5	7,15%
LPSE Kabupaten Kay Kanan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Kayong Utara	168	166	146	141	5	3,42%
LPSE Kabupaten Kebumen	142	138	323	312	11	3,34%
LPSE Kabupaten Kediri	94	87	231	194	37	16,09%
LPSE Kabupaten Keerom	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Kendal	170	170	154	149	5	3,17%
LPSE Kabupaten Kepahiang	94	90	85	82	3	3,28%
LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai	61	50	48	43	4	8,75%
LPSE Kabupaten Kepulauan Pangkajene	59	46	75	73	1	1,99%
LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe	105	103	98	92	5	5,37%
LPSE Kabupaten Kepulauan Selayar	76	75	68	66	2	2,99%
LPSE Kabupaten Kerinci	169	140	125	117	8	6,16%
LPSE Kabupaten Ketapang	210	190	140	128	12	8,30%
LPSE Kabupaten Klaten	248	242	237	186	51	21,60%
LPSE Kabupaten Klungkung	68	54	31	27	4	11,94%
LPSE Kabupaten Kolaka	211	201	142	139	3	2,13%
LPSE Kabupaten Kolaka Utara	119	117	134	130	4	2,99%
LPSE Kabupaten Komering Ulu Selatan	28	26	171	166	5	3,02%
LPSE Kabupaten Konawe	172	162	111	109	2	1,57%
LPSE Kabupaten Konawe Selatan	293	290	167	162	5	3,24%
LPSE Kabupaten Konawe Utara	56	53	27	27	1	1,94%
LPSE Kabupaten Kotabaru	273	241	231	211	20	8,73%
LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat	429	420	265	257	8	2,93%
LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur	254	252	423	406	18	4,21%
LPSE Kabupaten Kuantan Singingi	218	216	202	189	13	6,49%
LPSE Kabupaten Kuburaya	204	185	153	141	12	7,54%
LPSE Kabupaten Kudus	166	152	145	138	6	4,48%
LPSE Kabupaten Kulon Progo	207	206	139	128	11	7,79%
LPSE Kabupaten Kuningan	317	303	205	200	5	2,59%

LPSE Kabupaten Kupang	108	103	87	81	6	7,33%
LPSE Kabupaten Kutai Barat	157	141	353	342	11	3,13%
LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara	1872	1754	5731	5255	476	8,30%
LPSE Kabupaten Kutai Timur	566	557	734	641	93	12,67%
LPSE Kabupaten Labuan Batu Selatan	82	75	44	44	1	1,31%
LPSE Kabupaten Labuhan Batu	25	25	44	43	1	1,65%
LPSE Kabupaten Labuhan Batu Utara	16	16	25	25	0	0,67%
LPSE Kabupaten Lahat	242	232	289	283	7	2,26%
LPSE Kabupaten Lamandau	59	59	95	93	2	2,28%
LPSE Kabupaten Lamongan	178	176	198	185	12	6,15%
LPSE Kabupaten Lampung Barat	149	145	102	100	2	2,11%
LPSE Kabupaten Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Lampung Tengah	114	106	76	74	2	2,12%
LPSE Kabupaten Lampung Timur	468	392	181	176	5	2,92%
LPSE Kabupaten Lampung Utara	104	92	72	72	0	0,32%
LPSE Kabupaten Landak	392	388	269	263	6	2,33%
LPSE Kabupaten Langkat	134	130	210	203	8	3,58%
LPSE Kabupaten Lebak	405	370	238	230	8	3,38%
LPSE Kabupaten Lebong	138	125	121	117	4	3,70%
LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota	135	129	145	131	14	9,35%
LPSE Kabupaten Lombok Barat	83	82	107	93	14	13,03%
LPSE Kabupaten Lombok Tengah	106	101	239	227	12	4,97%
LPSE Kabupaten Lombok Timur	80	78	90	86	4	4,69%
LPSE Kabupaten Lombok Utara	83	80	103	92	11	10,42%
LPSE Kabupaten Lumajang	176	159	162	142	21	12,88%
LPSE Kabupaten Luwu	59	55	123	121	3	2,23%
LPSE Kabupaten Luwu Timur	91	91	206	191	15	7,35%
LPSE Kabupaten Luwu Utara	136	119	103	97	7	6,37%
LPSE Kabupaten Madiun	157	147	110	106	4	3,51%
LPSE Kabupaten Magelang	177	167	131	120	11	8,33%
LPSE Kabupaten Magetan	114	103	83	72	11	13,24%
LPSE Kabupaten Majalengka	383	381	258	243	14	5,46%
LPSE Kabupaten Majene	17	17	20	18	3	12,82%
LPSE Kabupaten Malang	454	432	393	376	17	4,29%
LPSE Kabupaten Malinau	434	393	1246	1200	46	3,70%
LPSE Kabupaten Maluku Tenggara	54	53	31	30	1	4,35%

LPSE Kabupaten Mamuju	213	199	176	172	4	2,10%
LPSE Kabupaten Mandailing Natal	132	125	100	93	7	7,30%
LPSE Kabupaten Manggarai Barat	15	15	14	13	0	1,24%
LPSE Kabupaten Manggarai Timur	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Manokwari	7	7	11	10	1	8,52%
LPSE Kabupaten Maros	267	247	247	239	7	2,95%
LPSE Kabupaten Melawi	55	46	42	41	1	1,83%
LPSE Kabupaten Merangin	17	10	15	5	10	66,24%
LPSE Kabupaten Meranti	26	24	32	29	4	11,02%
LPSE Kabupaten Merauke	18	2	2	2	0	14,99%
LPSE Kabupaten Mimika	10	7	23	23	0	1,28%
LPSE Kabupaten Minahasa	59	57	76	71	5	7,13%
LPSE Kabupaten Minahasa Selatan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara	1	1	10	9	1	12,31%
LPSE Kabupaten Minahasa Utara	109	98	100	95	5	4,75%
LPSE Kabupaten Mojokerto	101	91	223	211	13	5,61%
LPSE Kabupaten Morowali	78	74	114	108	6	5,35%
LPSE Kabupaten Muara Enim	583	574	735	714	21	2,92%
LPSE Kabupaten Muaro Jambi	260	259	329	317	12	3,57%
LPSE Kabupaten Muko Muko	112	98	75	71	4	5,26%
LPSE Kabupaten Muna	233	231	145	143	2	1,13%
LPSE Kabupaten Murung Raya	209	181	122	119	4	3,02%
LPSE Kabupaten Musi Banyuasin	1117	1105	1305	1260	45	3,48%
LPSE Kabupaten Musi Rawas	143	134	473	457	16	3,37%
LPSE Kabupaten Nagan Raya	128	128	116	110	6	5,23%
LPSE Kabupaten Natuna	199	191	246	230	16	6,58%
LPSE Kabupaten Nganjuk	194	174	129	115	14	11,00%
LPSE Kabupaten Ngawi	133	126	96	92	4	4,18%
LPSE Kabupaten Nias	31	31	29	28	2	5,40%
LPSE Kabupaten Nias Selatan	78	67	88	85	3	3,08%
LPSE Kabupaten Nias Utara	11	10	5	5	0	6,29%
LPSE Kabupaten Nunukan	470	430	792	731	61	7,73%
LPSE Kabupaten Ogan Ilir	275	242	510	493	17	3,41%
LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir	376	370	684	490	194	28,36%
LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu	88	71	38	35	4	9,17%
LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	220	217	243	239	5	1,94%

LPSE Kabupaten Pacitan	103	102	85	79	6	6,96%
LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara	249	186	210	206	4	1,83%
LPSE Kabupaten Pakpak Bharat	146	138	98	96	2	1,70%
LPSE Kabupaten Pamekasan	39	25	26	23	2	9,73%
LPSE Kabupaten Pandeglang	136	125	93	87	6	6,61%
LPSE Kabupaten Parigi Moutong	126	117	163	159	4	2,33%
LPSE Kabupaten Pasaman	118	110	110	92	18	16,47%
LPSE Kabupaten Pasaman Barat	210	190	186	173	14	7,33%
LPSE Kabupaten Paser	276	258	1158	1120	38	3,31%
LPSE Kabupaten Pasuruan	334	313	178	158	20	11,12%
LPSE Kabupaten Pati	160	151	137	132	5	3,99%
LPSE Kabupaten Pekalongan	217	205	123	113	9	7,65%
LPSE Kabupaten Pelalawan	345	194	269	242	28	10,26%
LPSE Kabupaten Pemalang	117	111	157	149	8	4,96%
LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara	183	105	164	156	9	5,23%
LPSE Kabupaten Pesawaran	207	205	235	233	2	0,94%
LPSE Kabupaten Pesisir Selatan	123	104	82	70	13	15,28%
LPSE Kabupaten Pidie	136	134	119	111	8	6,70%
LPSE Kabupaten Pidie Jaya	68	66	45	43	2	4,69%
LPSE Kabupaten Pinrang	96	91	127	123	4	2,87%
LPSE Kabupaten Pohuwato	182	172	115	110	5	4,49%
LPSE Kabupaten Polewali Mandar	5	5	4	4	0	3,25%
LPSE Kabupaten Ponorogo	92	88	77	71	6	7,45%
LPSE Kabupaten Pontianak	158	156	112	111	1	1,31%
LPSE Kabupaten Poso	34	31	75	73	1	1,70%
LPSE Kabupaten Pringsewu	169	168	137	136	1	0,60%
LPSE Kabupaten Probolinggo	37	30	29	27	2	7,15%
LPSE Kabupaten Pulang Pisau	264	254	166	157	9	5,57%
LPSE Kabupaten Pulau Morotai	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Purbalingga	207	185	197	191	7	3,33%
LPSE Kabupaten Purworejo	161	155	135	132	3	2,39%
LPSE Kabupaten Raja Ampat	94	81	114	112	2	1,56%
LPSE Kabupaten Rejang Lebong	94	90	143	138	6	3,84%
LPSE Kabupaten Rembang	67	56	98	94	4	4,21%
LPSE Kabupaten Rokan Hilir	5	5	155	151	4	2,75%
LPSE Kabupaten Rokan Hulu	314	285	312	276	36	11,49%

LPSE Kabupaten Rote Ndao	37	31	29	28	1	2,83%
LPSE Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Sambas	131	125	120	116	3	2,75%
LPSE Kabupaten Samosir	134	130	128	119	10	7,58%
LPSE Kabupaten Sampang	261	252	156	149	7	4,75%
LPSE Kabupaten Sanggau	219	210	162	157	4	2,75%
LPSE Kabupaten Sarolangun	187	177	151	142	9	5,84%
LPSE Kabupaten Sekadau	171	163	136	131	4	3,27%
LPSE Kabupaten Seluma	135	120	106	99	7	6,92%
LPSE Kabupaten Semarang	199	172	132	119	13	9,60%
LPSE Kabupaten Serang	89	73	75	67	8	10,60%
LPSE Kabupaten Serdang Bedagai	69	56	65	62	3	4,82%
LPSE Kabupaten Seruyan	112	97	144	137	7	4,77%
LPSE Kabupaten Siak	580	561	772	687	85	11,04%
LPSE Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	61	56	37	34	3	6,79%
LPSE Kabupaten Sidenreng Rappang	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Sidoarjo	427	416	331	282	49	14,92%
LPSE Kabupaten Sigi	77	68	73	70	3	4,47%
LPSE Kabupaten Sijunjung	148	134	112	99	14	12,09%
LPSE Kabupaten Sikka	14	12	5	5	0	8,94%
LPSE Kabupaten Simalungun	145	143	166	162	5	2,85%
LPSE Kabupaten Simeulue	168	159	146	137	10	6,66%
LPSE Kabupaten Sinjai	8	8	11	10	1	8,52%
LPSE Kabupaten Sintang	119	114	156	149	6	4,02%
LPSE Kabupaten Situbondo	244	234	153	146	7	4,51%
LPSE Kabupaten Sleman	274	263	242	216	26	10,76%
LPSE Kabupaten Solok	136	136	116	105	10	9,00%
LPSE Kabupaten Soppeng	83	79	101	95	6	5,51%
LPSE Kabupaten Sragen	163	161	184	174	10	5,18%
LPSE Kabupaten Sukamara	265	247	142	139	4	2,54%
LPSE Kabupaten Sukoharjo	143	134	142	133	9	6,56%
LPSE Kabupaten Sumba Barat	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kabupaten Sumba Tengah	23	20	25	24	1	3,82%
LPSE Kabupaten Sumba Timur	15	15	31	30	1	2,54%
LPSE Kabupaten Sumbawa	97	91	107	96	12	10,76%
LPSE Kabupaten Sumbawa Barat	60	59	46	42	4	9,09%

LPSE Kabupaten Sumedang	144	137	96	86	10	10,77%
LPSE Kabupaten Sumenep	169	164	136	110	26	18,85%
LPSE Kabupaten Tabalong	162	117	113	96	17	14,95%
LPSE Kabupaten Tabanan	118	113	102	98	4	4,38%
LPSE Kabupaten Tana Tidung	35	33	144	109	35	23,98%
LPSE Kabupaten Tana Toraja	56	53	77	72	5	6,77%
LPSE Kabupaten Tanah Bumbu	260	232	665	603	62	9,38%
LPSE Kabupaten Tanah Datar	183	155	110	90	20	17,80%
LPSE Kabupaten Tanah Laut	256	237	226	201	24	10,80%
LPSE Kabupaten Tangerang	773	745	764	749	15	1,98%
LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	460	429	448	432	16	3,62%
LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur	332	300	355	336	19	5,32%
LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan	219	204	227	215	11	5,03%
LPSE Kabupaten Tapanuli Utara	128	128	92	88	3	3,48%
LPSE Kabupaten Tapin	102	97	78	76	2	3,14%
LPSE Kabupaten Tasikmalaya	589	581	583	566	17	2,92%
LPSE Kabupaten Tebo	118	108	400	379	22	5,41%
LPSE Kabupaten Tegal	193	183	186	174	11	6,02%
LPSE Kabupaten Temanggung	179	170	118	105	13	11,05%
LPSE Kabupaten Timor Tengah Selatan	164	136	144	122	22	15,43%
LPSE Kabupaten Toba Samosir	36	29	55	51	4	7,30%
LPSE Kabupaten Tojo una-una	171	166	156	152	4	2,27%
LPSE Kabupaten Toraja Utara	79	79	97	88	9	9,31%
LPSE Kabupaten Trenggalek	122	111	104	94	10	9,95%
LPSE Kabupaten Tuban	432	416	248	243	5	2,08%
LPSE Kabupaten Tulang Bawang	153	153	118	118	1	0,46%
LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat	35	33	70	70	0	0,46%
LPSE Kabupaten Tulungagung	59	56	78	76	2	3,02%
LPSE Kabupaten Wajo	175	164	206	203	2	1,20%
LPSE Kabupaten Wakatobi	155	136	112	108	4	3,89%
LPSE Kabupaten Wonogiri	267	251	138	131	6	4,51%
LPSE Kabupaten Wonosobo	242	90	77	74	3	4,05%
LPSE Kementerian Agama	1369	1228	1355	1172	182	13,47%
LPSE Kementerian Dalam Negeri	353	333	1003	932	71	7,06%
LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	850	668	6419	2004	4415	68,78%

LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI	992	790	1297	1211	86	6,63%
LPSE Kementerian Kehutanan	933	848	906	785	121	13,38%
LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan	628	581	1710	1564	147	8,59%
LPSE Kementerian Kesehatan	1352	1165	3917	3035	882	22,52%
LPSE Kementerian Keuangan	2387	2077	5905	5070	835	14,14%
LPSE Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	20	5	3	3	1	17,83%
LPSE Kementerian Koperasi dan UKM	113	108	349	332	16	4,65%
LPSE Kementerian Luar Negeri	40	32	246	180	66	26,89%
LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia	435	422	692	606	85	12,32%
LPSE Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	297	280	1829	1746	83	4,53%
LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga	58	52	134	108	26	19,09%
LPSE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13	12	24	17	7	29,06%
LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	803	709	1777	1479	299	16,81%
LPSE Kementerian Perdagangan RI	128	120	493	434	60	12,08%
LPSE Kementerian Perhubungan	4105	3770	19157	16886	2271	11,85%
LPSE Kementerian Perindustrian	515	474	690	648	41	5,98%
LPSE Kementerian Pertanian	573	479	1137	971	166	14,60%
LPSE Kementerian Perumahan Rakyat	297	271	1289	1204	85	6,63%
LPSE Kementerian Riset dan Teknologi	80	76	357	313	44	12,43%
LPSE Kementerian Sosial	96	81	284	268	16	5,75%
LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	458	411	975	901	73	7,51%
LPSE Kementrian Pekerjaan Umum	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Kepolisian Republik Indonesia	619	570	6408	5935	473	7,38%
LPSE Kota Balikpapan	431	422	555	459	96	17,31%
LPSE Kota Banda Aceh	97	89	103	94	9	8,57%
LPSE Kota Bandar Lampung	48	32	66	65	1	1,45%
LPSE Kota Bandung	697	666	839	691	148	17,67%
LPSE Kota Banjar	203	199	213	207	6	3,01%
LPSE Kota Banjarbaru	176	161	142	125	17	11,90%
LPSE Kota Banjarmasin	311	278	549	509	39	7,12%
LPSE Kota Batam	418	401	432	380	52	12,01%

LPSE Kota Batu	135	122	85	78	7	8,65%
LPSE Kota Baubau	129	126	104	102	2	2,06%
LPSE Kota Bekasi	654	643	438	388	51	11,55%
LPSE Kota Bengkulu	108	105	82	72	10	12,49%
LPSE Kota Bima	7	6	10	10	0	3,21%
LPSE Kota Binjai	138	123	136	128	8	5,86%
LPSE Kota Bitung	250	198	196	190	6	3,30%
LPSE Kota Blitar	98	90	109	102	7	6,08%
LPSE Kota Bogor	306	296	222	204	17	7,85%
LPSE Kota Bontang	273	222	544	527	17	3,08%
LPSE Kota Bukittinggi	85	77	52	45	6	12,23%
LPSE Kota Cilegon	291	286	205	190	15	7,47%
LPSE Kota Cimahi	146	128	81	74	7	8,80%
LPSE Kota Cirebon	96	96	97	88	9	9,42%
LPSE Kota Denpasar	239	215	286	244	42	14,71%
LPSE Kota Depok	731	681	475	414	61	12,80%
LPSE Kota Dumai	257	253	314	289	25	7,88%
LPSE Kota Gunungsitoli	299	261	201	196	5	2,42%
LPSE Kota Jambi	210	182	98	93	5	5,16%
LPSE Kota Jayapura	25	24	45	43	2	4,42%
LPSE Kota Kediri	48	48	84	79	5	5,61%
LPSE Kota Kendari	139	133	409	104	304	74,44%
LPSE Kota Kotamobagu	52	48	101	91	11	10,47%
LPSE Kota Kupang	94	85	82	76	5	6,68%
LPSE Kota Langsa	98	96	75	72	3	3,84%
LPSE Kota Lhokseumawe	96	89	88	85	3	3,47%
LPSE Kota Lubuklinggau	192	173	375	366	9	2,29%
LPSE Kota Madiun	127	121	163	149	14	8,47%
LPSE Kota Magelang	50	47	63	60	3	4,91%
LPSE Kota Makassar	210	204	249	238	11	4,50%
LPSE Kota Malang	302	280	284	267	17	5,91%
LPSE Kota Manado	180	169	207	195	12	6,00%
LPSE Kota Mataram	63	61	88	78	9	10,48%
LPSE Kota Medan	481	457	520	488	32	6,11%
LPSE Kota Metro	57	47	53	51	2	4,45%
LPSE Kota Mojokerto	63	57	70	62	8	11,16%

LPSE Kota Padang	165	151	179	159	20	10,95%
LPSE Kota Padang Sidempuan	142	141	99	98	2	1,77%
LPSE Kota Pagar Alam	30	24	63	62	1	1,68%
LPSE Kota Palangkaraya	173	162	110	106	4	3,64%
LPSE Kota Palembang	578	579	499	486	13	2,56%
LPSE Kota Palopo	38	36	50	49	1	1,13%
LPSE Kota Palu	151	148	226	221	4	1,98%
LPSE Kota Pangkal Pinang	117	106	78	76	3	3,43%
LPSE Kota Pare-pare	58	55	96	94	2	2,18%
LPSE Kota Pasuruan	11	3	6	6	0	4,70%
LPSE Kota Payakumbuh	100	89	96	85	12	11,97%
LPSE Kota Pekalongan	131	128	127	123	4	2,92%
LPSE Kota Pekanbaru	313	293	293	284	10	3,25%
LPSE Kota Pematangsiantar	79	73	46	45	1	2,15%
LPSE Kota Pontianak	222	219	293	282	11	3,81%
LPSE Kota Prabumulih	257	233	260	256	4	1,48%
LPSE Kota Probolinggo	45	44	24	22	3	12,17%
LPSE Kota Sabang	95	90	74	69	6	7,67%
LPSE Kota Salatiga	78	60	57	53	4	7,46%
LPSE Kota Samarinda	522	512	886	838	47	5,36%
LPSE Kota Semarang	343	305	434	362	72	16,49%
LPSE Kota Serang	91	76	65	60	5	7,15%
LPSE Kota Singkawang	194	190	120	115	5	4,12%
LPSE Kota Solok	78	70	73	62	11	14,67%
LPSE Kota Subulussalam	108	101	92	85	7	7,30%
LPSE Kota Sungai Penuh	187	137	137	123	14	10,34%
LPSE Kota Surabaya	999	903	1457	1139	317	21,79%
LPSE Kota Surakarta	220	199	245	231	15	6,01%
LPSE Kota Tangerang	573	549	895	747	148	16,49%
LPSE Kota Tangerang Selatan	534	524	634	607	27	4,24%
LPSE Kota Tanjung Balai	146	140	114	111	3	2,89%
LPSE Kota Tarakan	297	279	1101	1039	62	5,63%
LPSE Kota Tasikmalaya	255	252	226	219	6	2,79%
LPSE Kota Tebing Tinggi	23	22	105	99	6	5,94%
LPSE Kota Tegal	92	83	88	79	9	10,21%
LPSE Kota Ternate	93	89	129	123	6	4,65%

LPSE Kota Tomohon	110	71	77	76	2	2,40%
LPSE Kota Yogyakarta	342	306	442	366	76	17,21%
LPSE LAPAN	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	137	121	229	199	30	13,27%
LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	344	254	1721	1066	655	38,05%
LPSE Lembaga Ketahanan Nasional	21	20	19	18	1	7,30%
LPSE Lembaga Sandi Negara	92	85	1366	1355	11	0,79%
LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia	335	297	700	660	40	5,73%
LPSE Mahkamah Konstitusi	14	11	58	55	3	5,21%
LPSE Mahkamah Syar'iyah Aceh	24	23	24	22	2	8,18%
LPSE Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	17	15	66	49	17	25,70%
LPSE PT Angkasa Pura II (Persero)	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara	33	23	119	100	20	16,41%
LPSE PT. Pelayaran Nasional Indonesia	16	5	15	13	1	9,72%
LPSE PT. Perusahaan Listrik Negara	1337	1285	3555	3211	344	9,69%
LPSE Pelabuhan Indonesia 1 Medan	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Politeknik Negeri Bandung	45	34	28	25	3	9,41%
LPSE Politeknik Negeri Jakarta	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Politeknik Negeri Jember	14	12	41	40	2	3,77%
LPSE Politeknik Negeri Lampung	472	460	537	521	16	2,98%
LPSE Politeknik Negeri Malang	24	22	134	127	7	5,42%
LPSE Politeknik Negeri Sriwijaya	5	5	74	66	8	10,66%
LPSE Politeknik Negeri Ujung Pandang	18	11	76	75	1	1,88%
LPSE Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	4	4	2	1	0	9,33%
LPSE Provinsi Aceh	3397	3229	3402	3065	337	9,90%
LPSE Provinsi Bali	421	397	908	801	107	11,78%
LPSE Provinsi Banten	865	742	1292	1238	55	4,23%
LPSE Provinsi Bengkulu	373	352	469	420	49	10,52%
LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	632	597	644	573	72	11,16%
LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	6745	6355	17461	13668	3793	21,72%
LPSE Provinsi Gorontalo	299	283	355	328	26	7,44%
LPSE Provinsi Jambi	475	333	664	607	57	8,52%
LPSE Provinsi Jawa Barat	3455	2979	3077	2770	308	9,99%
LPSE Provinsi Jawa Tengah	1351	1269	1705	1503	202	11,83%

LPSE Provinsi Jawa Timur	1378	1248	2460	2118	342	13,90%
LPSE Provinsi Kalimantan Barat	544	511	815	747	68	8,40%
LPSE Provinsi Kalimantan Selatan	519	420	1096	1022	74	6,72%
LPSE Provinsi Kalimantan Tengah	919	692	857	827	29	3,42%
LPSE Provinsi Kalimantan Timur	1334	1259	4047	3201	847	20,92%
LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	259	227	553	524	28	5,13%
LPSE Provinsi Kepulauan Riau	996	943	1099	1006	93	8,45%
LPSE Provinsi Lampung	921	893	1324	1310	14	1,05%
LPSE Provinsi Maluku	437	348	351	330	21	6,04%
LPSE Provinsi Maluku Utara	38	30	54	53	1	1,85%
LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat	310	300	728	529	199	27,28%
LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur	434	360	549	523	25	4,64%
LPSE Provinsi Papua	240	201	818	756	62	7,60%
LPSE Provinsi Papua Barat	2	2	5	3	1	26,38%
LPSE Provinsi Riau	1150	1086	2226	1967	259	11,64%
LPSE Provinsi Sulawesi Barat	352	319	322	296	26	8,22%
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	547	524	1429	1372	57	3,99%
LPSE Provinsi Sulawesi Tengah	589	543	780	742	38	4,89%
LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	637	559	1041	999	42	4,01%
LPSE Provinsi Sulawesi Utara	414	371	522	492	30	5,71%
LPSE Provinsi Sumatera Barat	1351	1258	1296	1163	133	10,30%
LPSE Provinsi Sumatera Selatan	911	838	1491	1320	171	11,46%
LPSE Provinsi Sumatera Utara	907	868	1499	1411	89	5,90%
LPSE RS. Wahidin Sudirohusodo	60	48	159	143	16	9,78%
LPSE RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat	38	36	31	26	5	15,40%
LPSE STAIN Parepare	7	7	15	13	2	12,71%
LPSE Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember	6	6	5	4	0	8,43%
LPSE Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1	1	2	2	0	5,60%
LPSE TNI ANGKATAN UDARA	2	2	1	1	0	1,75%
LPSE TNI Angkatan Darat	13	13	8	8	0	2,03%
LPSE Televisi Republik Indonesia	41	36	121	103	19	15,37%
LPSE Tentara Nasional Indonesia	1	1	1	1	0	3,14%
LPSE Universitas Airlangga	56	49	112	96	16	14,08%

LPSE Universitas Andalas	22	19	30	28	2	6,36%
LPSE Universitas Bandar Lampung	6	6	9	9	0	1,73%
LPSE Universitas Bengkulu	27	24	34	32	2	4,79%
LPSE Universitas Brawijaya	76	70	350	311	39	11,23%
LPSE Universitas Diponegoro	450	401	552	483	69	12,47%
LPSE Universitas Gadjah Mada	88	65	87	68	19	21,90%
LPSE Universitas Haluoleo	17	17	109	107	2	1,62%
LPSE Universitas Hasanudin	57	52	116	111	5	4,29%
LPSE Universitas Indonesia	93	77	102	83	19	18,75%
LPSE Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	17	17	36	34	1	3,53%
LPSE Universitas Jambi	16	14	47	37	10	20,47%
LPSE Universitas Jember	22	21	80	77	3	3,76%
LPSE Universitas Jenderal Soedirman	44	42	88	81	7	8,28%
LPSE Universitas Lambung Mangkurat	8	7	13	12	1	5,69%
LPSE Universitas Lampung	31	27	108	91	17	16,13%
LPSE Universitas Malikussaleh	16	16	24	23	1	5,21%
LPSE Universitas Mulawarman	62	61	104	95	9	8,46%
LPSE Universitas Negeri 11 Maret	0	0	0	0	0	0,00%
LPSE Universitas Negeri Gorontalo	8	8	122	73	49	40,32%
LPSE Universitas Negeri Makassar	43	40	98	90	8	8,06%
LPSE Universitas Negeri Malang	45	42	70	63	7	10,39%
LPSE Universitas Negeri Manado	24	22	140	130	10	6,94%
LPSE Universitas Negeri Medan	356	303	422	402	19	4,61%
LPSE Universitas Negeri Padang	48	41	66	61	6	8,74%
LPSE Universitas Negeri Semarang	51	42	180	162	18	10,13%
LPSE Universitas Negeri Surabaya	36	35	214	201	13	6,06%
LPSE Universitas Palangka Raya	18	18	22	22	1	2,30%
LPSE Universitas Riau	21	20	33	29	3	9,88%
LPSE Universitas Sam Ratulangi	20	15	29	25	4	13,92%
LPSE Universitas Sriwijaya	59	51	66	60	6	9,09%
LPSE Universitas Sumatera Utara	93	92	139	124	15	10,82%
LPSE Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	64	61	279	261	17	6,21%
LPSE Universitas Tadulako	28	28	136	133	4	2,71%
LPSE Universitas Tanjung Pura	25	24	132	130	2	1,34%
LPSE Universitas Udayana	0	0	0	0	0	0,00%